

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN PANDEGLANG

ANALYSIS PROBLEM OF SOCIAL AND POTENTIAL OF SOCIAL WELFARE SOURCES IN PANDEGLANG DISTRICT

Daud Bahransyaf

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS). Kementerian Sosial RI
Jl. Kesejahteraan Sosial No.1 Sonosewu Yogyakarta, Indonesia, Telp 0274 377265

Email daudbram@gmail.com

Naskah diterima 11 Mei 2018, direvisi 4 Juni 2018, disetujui 2 Juli 2018

Abstract

Disaster Alert Village research conducted in Munjul Subdistrict, Pandeglang Regency, Banten Province, obtained some information that Munjul Subdistrict is a Ciliman river basin which empties into Labuhan Beach. The Ciliman River is a large river which routinely overflows when there is high rainfall. Last February 2017, the Ciliman River overflowed and there were floods in 7 (seven) subdistricts in Pandeglang Regency, including in Munjul District. Anticipation of facing flooding problems that often occur at the location of this study, the local government through the Banten Provincial Social Service established a social organization that is alert to flood emergency response conditions as the Campaign for Disaster Preparedness (KSB). The aim of the study was to find out about people with social welfare problems (PMKS) and potential social welfare sources (PSKS). The research method uses a qualitative descriptive approach which is trying to obtain a better understanding of the conditions of the research location which are prone to natural floods, especially in the rainy season. The acquisition of field data provided data and information that the neglected elderly PMKS is the largest number in Pandeglang District, and this information illustrates that a large number of people over the age of 60 and living in deprivation. The next number of PMKS which is quite striking are persons with disabilities and women who are socially and economically vulnerable. Potential and Sources of Social Welfare (PSKS) at the location of the researchers looked quite varied in data. Social workers are very dominant in their existence, then there are two PSKS who also look quite potential in the district, namely PKH facilitators and their operators.

Keyword: Problem, Potential, Social Welfare.

Abstrak

Penelitian Kampung Siaga Bencana yang dilakukan di Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten diperoleh beberapa informasi bahwa Kecamatan Munjul merupakan wilayah aliran sungai Ciliman yang bermuara di Pantai Labuhan. Sungai Ciliman ini merupakan sebuah sungai besar yang rutin meluap ketika terjadi curah hujan tinggi. Bulan Februari 2017 yang lalu, sungai Ciliman ini meluap dan terjadi banjir pada 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Pandeglang, termasuk di Kecamatan Munjul. Antisipasi menghadapi masalah banjir yang kerap terjadi di lokasi penelitian ini, pemerintah daerah setempat melalui Dinas Sosial Provinsi Banten membentuk organisasi sosial yang siaga dengan kondisi tanggap darurat banjir dengan sebutan Kampung Siaga Bencana (KSB). Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS). Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni mencoba memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi lokasi penelitian yang rawan terjadi bencana alam banjir terutama dimusim penghujan. Perolehan data lapangan yang dilakukan memberikan data dan informasi bahwa PMKS lanjut usia terlantar merupakan jumlah terbesar yang ada di Kabupaten Pandeglang, dan informasi ini menggambarkan bahwa cukup besar jumlahnya warga yang berusia di atas 60 tahun dan hidup dalam kekurangan. PMKS berikutnya yang jumlahnya cukup mencolok adalah penyandang Disabilitas dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di lokasi peneliti terlihat cukup variatif data nya. Pekerja sosial masyarakat sangat mendominasi keberadaannya, kemudian terdapat dua PSKS yang juga terlihat cukup potensial jumlahnya di wilayah kabupaten ini yaitu pendamping PKH dan operatonya.

Kata Kunci: PMKS, PSKS, Kesejahteraan Sosial

A. PENDAHULUAN

Pandeglang merupakan salah satu kabupaten dari 6 (enam) kabupaten yang ada di Provinsi Banten dan menjadi salah satu lokasi penelitian tentang Kampung Siaga Bencana. Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS). Adapun lokasi penelitian di Kabupaten Pandeglang terletak di Kecamatan Munjul yang diketahui setiap tahun mengalami bencana alam yaitu bencana banjir. Kabupaten Pandeglang di tahun 2017 telah ditetapkan sebagai wilayah darurat banjir oleh BNPB.

Kabupaten Pandeglang secara geografis memiliki luas wilayah sebesar 274.689,91 Ha atau 2.747 Km² dan secara wilayah administratif terbagi atas 35 (tiga puluh lima) wilayah kecamatan, 322 (tiga ratus dua puluh dua) desa dan 13 (tiga belas) kelurahan. Secara topografis, daerah Pandeglang ini sebagian besar merupakan dataran rendah, yaitu terletak di bagian tengah dan selatan, dengan variasi ketinggian antara 0 – 1.778 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan luas 85.07 persen dari luas wilayah Kabupaten Pandeglang.

Perbedaan ketinggian di Kabupaten Pandeglang ini secara umum cukup tajam, dengan titik tertinggi 1.778 m di atas permukaan laut (dpl) yang terdapat di puncak Gunung Karang pada daerah bagian utara dan titik terendah terletak di daerah pantai dengan ketinggian 0 meter (dpl). Daerah pegunungan pada umumnya memiliki ketinggian rata-rata ± 400 meter dpl, dataran rendah bukan pantai umumnya memiliki ketinggian rata-rata 30 meter dpl dan daerah dataran rendah pantai dengan ketinggian rata-rata 3 meter dpl.

Ditinjau dari kemiringan tanah di Kabupaten Pandeglang bervariasi antara 0 – 45 persen dengan alokasi sebesar 0-15 persen areal dataran sekitar pantai selatan dan pantai Selat Sunda, 15-25 persen areal berbukit dan alokasi 25-45 persen areal bergunung pada bagian tengah dan utara. Disamping itu wilayah kabupaten ini memiliki 6 (enam) gunung, yaitu gunung Karang (1.778 mdpl), gunung Pulosari

(1.346 mdpl), gunung Aseupan (1.174 mdpl), gunung Payung (480 mdpl), gunung Honje (620 mdpl) dan gunung Tilu (562 mdpl). Dilihat dari curah hujan, di kabupaten ini terdapat 3.000 mm/tahun yang terjadi di wilayah penakar hujan yakni di kecamatan Menes, Labuan, Cibaliung, Mandalawangi dan kecamatan Jiput. Puncak curah hujan akan terjadi di bulan November sampai dengan february dan bulan kering terjadi pada bulan Mei sampai September. Rata-rata curah hujan per tahun menurut klasifikasi Koppen, kabupaten Pandeglang termasuk dalam iklim AF atau iklim hujan tropis. Curah hujan berdasarkan zone Agroklimat Oldeman, kabupaten ini termasuk dalam zone A1. Curah hujan yang tinggi di kabupaten Pandeglang ini yang menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir setiap tahunnya.

Kabupaten Pandeglang ini bila ditelaah dari segi geologi, memiliki berbagai jenis batuan antara lain seperti Aluvium, Undifferentiated (bahan erupsi gunung berapi), Diocena, Plocena Sedimen, Miocena Lemistone, dan Mineral Deposit. Ditinjau dari jenis tanah di wilayah kabupaten ini antara lain Alluvial, Grumosol, Mediteran, dan Latosol. Adapun jenis tanah Alluvial ini merupakan jenis tanah yang rawan longsor apabila berada di daerah perbukitan. Oleh karena itu jenis tanah tersebut dapat dikaitkan dengan potensi terjadinya tanah longsor di kabupaten Pandeglang ini.

Selanjutnya dilihat dari keadaan Geomorfologi, Topografi, dan bentuk wilayah secara bersama-sama akan membentuk pola aliran sungai yang ada. Pola aliran sungai di wilayah kabupaten Pandeglang ini pada umumnya berbentuk Dendritik. Arah aliran sungai di wilayah ini dibedakan menjadi dua aliran, yaitu aliran dari arah timur yang bermuara di selat sunda dan daerah aliran dari arah utara yang bermuara di Samudera Indonesia. Wilayah kabupaten Pandeglang diketahui memiliki 14 (empat belas) aliran sungai yang berukuran sedang hingga besar. Diantara sungai sebanyak ini yang mengalir melewati daerah Kecamatan Munjul dan mendatangkan banjir adalah sungai ciliman.

Daerah aliran sungai di Pandeglang yang sebagian bertalud, tetapi kondisinya sebagian besar banjir yang rutin terjadi setiap tahunnya. Terdapat 7 (tujuh) kecamatan di wilayah kabupaten ini yang rawan banjir, diantaranya Kecamatan Labuhan, Sindang Resmi, Sukaresmi, Panimbang Patia, Pagelaran, Angsana dan Kecamatan Munjul. Sungai yang mengalir di beberapa wilayah kecamatan ini menjadi tumpuan pembuangan air hujan menuju Samudera Indonesia. Karena kondisi DAS tidak mampu menampung dan mengalirkan air hujan, mengakibatkan selalu terjadi banjir di musim penghujan, namun di musim kemarau berakibat terjadinya kekeringan, sehingga memerlukan dropping air bersih.

Berdasarkan data dari Biro Pusat statistik (BPS) tahun 2016, jumlah penduduk di Kabupaten Pandeglang berjumlah 1.200.512 jiwa yang tersebar di 35 (tiga puluh lima) kecamatan, dengan rincian penduduk laki-laki 613.108 jiwa dan perempuan sebesar 587.404 jiwa. Khusus untuk Kecamatan Munjul yang menjadi lokasi penelitian, jumlah penduduk laki-laki berjumlah 11.706 jiwa dan perempuan berjumlah 11.306 jiwa. (jumlah total penduduknya 23.012 jiwa). Kepadatan penduduk di Kecamatan Munjul ini pada tahun 2014 sebesar 335 per km² jiwadan ditahun 2015 menjadi 337 km².

Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Pandeglang terlihat cukup variatif seperti petani, pedagang, buruh, pegawai negeri sipil, pegawai swasta dan TNI/POLRI. Secara khusus mata pencaharian penduduk di lokasi penelitian yaitu Kecamatan Munjul, sebagian besar sebagai petani. Lahan pertanian dan potensinya cukup baik, dengan adanya pengairan yang relatif cukup baik untuk dimanfaatkan oleh para petani. Tetapi kondisi ini akan berubah drastis apabila datang musim penghujan, dimana sering sekali terjadi banjir yang cukup besar, dalam arti dapat merendam lahan pertanian tersebut, sehingga tanaman yang siap panen dapat rusak atau tidak dapat dipanen, sehingga menjadi permasalahan tersendiri dari para petani di lokasi ini.

Kecamatan Munjul merupakan wilayah aliran sungai Ciliman yang bermuara di Pantai Labuhan. Sungai Ciliman ini merupakan

sebuah sungai besar yang rutin meluap ketika terjadi curah hujan tinggi. Seperti yang terjadi pada bulan Februari 2017 yang lalu, sungai Ciliman ini meluap dan terjadi banjir pada 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Pandeglang, termasuk di Kecamatan Munjul. Banjir yang terjadi merupakan masalah yang mendominasi terhadap kehidupan dan penghidupan penduduknya, walaupun biasanya teriring masalah tanah longsor khususnya pada wilayah perbukitan yang ada di Kabupaten Pandeglang, dan berpotensi bermasalah bagi transportasi warga masyarakat yang bermukim di Kecamatan Munjul.

Mengatasi masalah banjir yang kerap terjadi di lokasi penelitian ini, pemerintah daerah setempat melalui Dinas Sosial Provinsi Banten membentuk organisasi sosial yang siaga dengan kondisi tanggap darurat banjir dengan inisial Kampung Siaga Bencana (KSB). Organisasi yang dapat dikatakan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam penanganan korban bencana alam, KSB di siapkan untuk menghadapi datangnya bencana banjir atau pra bencana, pada masa tanggap darurat ketika banjir melanda maupun pasca bencana, termasuk proses rehabilitasi baik fisik maupun sosial.

Kampung Siaga Bencana (KSB) dibentuk dari unsur Tagana yang sudah dilatih secara nasional, PSM, Karang Taruna/pemuda, Pramuka, Guru/pendidik, Unsur kesehatan/Puskesmas, Trantib Desa, Satpol PP Kecamatan, Tokoh Masyarakat dan aparat kecamatan (relawan).

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni mencoba memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi lokasi penelitian yang rawan terjadi bencana alam banjir terutama dimusim penghujan. Metode ini digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor dalam Meleong 2002).

Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan

Munjul Kabupaten Pandeglang, dengan pertimbangan lokasi tersebut sering terjadi bencana alam banjir di musim penghujan, dan menimbulkan masalah kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat sekitarnya.

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan dan observasi yang digunakan untuk melihat dan mengamati kehidupan dan penghidupan warga masyarakat di lokasi penelitian dan sarana prasarana penunjang yang dimanfaatkan bila terjadi bencana alam banjir. Analisa data dilakukan dengan teknik kualitatif, pemaknaan data dari hasil wawancara dan observasi yang diperoleh di lokasi penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejadian bencana identik dengan segala sesuatu yang tidak menyenangkan karena menimbulkan penderitaan manusia, kerusakan terhadap material dan kerusakan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007, jenis bencana adalah 1) Bencana alam, adalah suatu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. 2) Bencana non alam, yakni bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. 3) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror (Undang-Undang RI, 2007).

Potensi terjadinya bencana bukan hanya karena faktor alam, tetapi juga dapat berasal dari perilaku dan perlakuan manusia terhadap alam. Keberadaan gunung berapi, sungai, pesisir mempunyai arti penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Perubahan fungsi lingkungan dan berkurangnya daya dukung untuk resapan air merupakan determinan besar terhadap terjadinya banjir dan tanah longsor. (Gunawan, 2016).

Terkait dengan hal diatas, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana alam sebagai suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda serta dampak psikologis.

Jenis bencana secara spesifik dapat dikelompokkan kedalam enam (6) kelompok, yaitu : bencana geologi; bencana hydro-meteorologi; bencana biologi; bencana kegagalan teknologi; bencana lingkungan; bencana sosial; dan kedaruratan kompleks yang merupakan kombinasi dari situasi bencana pada suatu daerah konflik (Nurjanah dkk,2014).

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk wilayah yang relatif rawan bencana alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, angin topan, tsunami, tanah longsor dan kekeringan. Bencana alam dapat bersifat destruktif, merugikan dan memerlukan waktu pemulihan yang relatif tidak singkat. Bencana alam dapat menimbulkan dampak berantai seperti dampak psikologis, sosial, ekonomi, fisik dan dampak lainnya. Sering ditemui akibat bencana alam ini adalah terjadinya perubahan kehidupan dan penghidupan warga masyarakat, karena kehilangan pekerjaan, harta benda, kehilangan anggota keluarga. Adapun dampak fisik dan ekonomi antaralain kematian, terjadinya luka-luka, hancurnya tempat tinggal dan atau tempat usaha, dan rusaknya sarana dan prasarana publik dan ekonomi.

Bagi masyarakat yang bermukim di wilayah rawan bencana terdapat enam macam permasalahan terkait dengan kerentanan yang dihadapi dalam konteks sosial (David dan Alexander dalam Ozerdam dkk; 2006). Pertama, kerentanan ekonomi, yaitu terdapat kondisi yang termaginalkan dalam memperoleh penghasilan selama terjadi bencana. Banyak penduduk yang kehilangan mata pencaharian selama terjadi bencana. Kedua, kerentanan dalam bidang teknologi. Terdapat perbedaan akses terhadap tekonologi level kelompok masyarakat yang di

tinggal di kota dan di pedesaan, negara kaya dan negara miskin, kelompok elit dan non elit. Ketiga, adanya kemunduran atau ketertinggalan, yaitu kerentanan terhadap kemungkinan timbulnya keadaan yang membuat masyarakat menjadi tertinggal dan harus membangun kembali kehidupannya. Hal ini memerlukan bantuan dari institusi seperti pemerintah dan bantuan dana.

Salah satu model penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang selanjutnya diinisiasi oleh Kementerian Sosial yang mewadahi kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah rawan bencana adalah Kampung Siaga Bencana (KSB). KSB adalah suatu wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana yang diluncurkan pada tahun 2011 oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI (Kementerian Sosial 2011).

Kampung Siaga Bencana (KSB) sebagai organisasi formal penanggulangan bencana berbasis masyarakat dalam kawasan di daerah bencana alam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan KSB dimaksudkan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat dari ancaman dan dampak bencana dengan cara menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya alam dan manusia yang ada di lingkungan setempat.

Keberadaan KSB ini sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa Kementerian Sosial mengubah arah kebijakan dalam penanggulangan bencana yang awalnya bantuan sosial menjadi perlindungan sosial. Aktivitas kegiatan penanggulangan bencana pada bantuan sosial arahnya lebih karikatif sedang bidang perlindungan sosial memiliki kegiatan lebih luas, yakni kegiatan penanggulangan bencana diarahkan pada upaya pencegahan dan menangani permasalahan sosial yang

diakibatkan oleh guncangan (*shock*). Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Urusan Pemerintah Bidang Sosial merupakan salah satu urusan yang dibagi kewenangannya dengan Pemerintah Daerah. (Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial (2011). Petunjuk Teknis Kampung Siaga Bencana. Jakarta: Kementerian Sosial.)

Prinsip utama pelaksanaan kampung siaga bencana (KSB) adalah mengutamakan kemandirian masyarakat. Dukungan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam penanggulangan seperti pemerintah dan pihak swasta masih tetap dibutuhkan. Dalam implementasinya KSB menerapkan prinsip kesukarelaan, kerjasama, akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan), partisipasi (melibatkan seluruh komponen masyarakat), menghargai dan menghormati nilai-nilai lokal (kearifan lokal), mengedepankan kemandirian masyarakat dan lebih menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.

Dalam melaksanakan perannya, KSB mempunyai komponen institusi internal sebagai penggerak aktivitas penanggulangan bencana. Komponen dimaksud adalah a) motivasi terbentuknya KSB, b) legitimasi KSB, c) sumber daya manusia, d) sarana dan prasarana, e) aksesibilitas dalam pelaksanaan bencana. (Teti Ati Padmi, dkk, Hal 68-85, 2013).

Pembentukan KSB didasari oleh keinginan dan kepedulian warga di daerah rawan bencana untuk mengantisipasi resiko, dan meminimalisir ancaman bencana dengan melakukan kesiapsiagaan dan kepedulian terhadap korban bencana. Dengan motivasi yang tinggi, KSB diharapkan secara maksimal mampu mencegah korban jiwa, harta benda, sumber daya ekonomi, dan dapat mengurangi penderitaan masyarakat terdampak bencana, serta yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang resiko bencana. Adapun tugas KSB antara lain melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebelum, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (2001). *Petunjuk Teknis Kampung Siaga Bencana (KSB)*, Jakarta. Kementerian Sosial RI.

Selanjutnya mengenai Kampung Siaga Bencana (KSB), terutama dalam *disaster management* KSB lebih banyak berperan dalam situasi *incident management* yang secara langsung menangani korban bencana alam di lokasi kejadian dengan mengutamakan kemandirian KSB di masyarakat dengan dukungan pihak terkait. Dukungan dimaksud agar pihak terkait dapat memotivasi dan memperkuat kelembagaan penanggulangan bencana dan korban bencana alam, khususnya pada tahap kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan dimaksud adalah Kesiapsiagaan masyarakat dalam merencanakan suatu tindakan untuk mengurangi akibat dari suatu bencana. KSB juga harus melakukan aktivitas kegiatan baik sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana dan pasca bencana yang merupakan siklus yang tidak terpisahkan antara tahap satu dengan tahap lainnya. (Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, 2011).

1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Pandeglang

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Pandeglang terlihat cukup banyak, seperti yang ditampilkan pada tabel 1 dibawah ini. Lanjut usia terlantar merupakan jumlah terbesar yang ada di Kabupaten Pandeglang yaitu 6.462 jiwa. Data ini menggambarkan bahwa cukup besar jumlahnya warga yang berusia diatas 60 tahun dan hidup dalam kekurangan. PMKS berikutnya yang jumlahnya cukup mencolok adalah penyandang Disabilitas yang berjumlah 4.469 jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Pandeglang ini penyandang disabilitas cukup menonjol keberadaannya, yang salah satu sebabnya karena kemiskinan, yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya akan kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu timbul masalah lain yakni suatu penyakit yang menyebabkan disabilitas baik pada warga masyarakat seperti yang ditunjukkan data dibawah yakni ada 504 Anak

dengan Kedisabilitas. Data berikutnya yang jumlahnya juga relatif besar adalah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang berjumlah 3.982 jiwa.

Kondisi PMKS yang ditunjukkan pada data dibawah ini (Tabel 1) menggambarkan bahwa PMKS di Kabupaten Pandeglang ini sampai dengan tahun 2016 memang cukup besar jumlah penyandanganya. Bila diruntut berdasarkan angka ratusan terhadap PMKS ini dapat diketahui bahwa Anak terlantar berjumlah 761 jiwa, yang berarti juga memang terdapat masalah kesejahteraan sosial yang bertumpu pada sosial ekonomi yaitu pekerjaan dan penghasilan para kepala keluarga atau yang bekerja berjumlah sedikit, atau dengan kata lain berpendapatan perbulan dibawah upah minimum di kabupaten ini. Kondisi ini juga tampak dari ada PMKS pemulung, pengemis dan gelandangan yang bermukim di wilayah ini, walaupun jumlahnya tidak terlalu besar yakni masing-masing sebesar 108 jiwa pemulung, 42 jiwa pengemis dan 19 jiwa gelandangan. Disamping itu karena wilayah atau lokasi ini juga merupakan lokasi yang sering terjadi bencana, maka juga terdapat 362 jiwa merupakan korban bencana alam dan relatif sedikit jumlah korban bencana sosial yaitu 16 jiwa saja. Masalah kesejahteraan sosial berikutnya yang perlu diketahui dan dipantau keberadaannya adalah terdapat korban penyalahgunaan Napza yakni 45 jiwa, walaupun lokasi ini relatif jauh dengan Ibu Kota Indonesia yaitu Jakarta dan Kota provinsi yakni Banten, ternyata sudah ada juga korban penyalahgunaan Napza. Kondisi ini menggambarkan bahwa penyebaran dan pengguna penyalahgunaan Napza sudah sampai kelokasi desa yang sebenarnya kehidupan dan penghidupan warga masyarakatnya masih kokoh memegang tradisi, nilai dan norma di lokasi ini.

Tabel 1

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Pandeglang tahun 2016

No	Jenis PMKS	Jumlah (jiwa)
(1)	(2)	(3)
1	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	3.982
2	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	5
3	Anak Balita Terlantar	301

4	Anak Terlantar	761
5	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	21
6	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	5
7	Anak dengan Kedisabilitasan	504
8	Lanjut Usia Terlantar	6.462
9	Gelandangan	19
10	Pengemis	42
11	Pemulung	108
12	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan	60
13	Korban Penyalahgunaan Napza	45
14	Orang dengan Penyandang HIV/AIDS (ODHA)	6
15	Penyandang Disabilitas	4.469
16	Korban Tindak Kekerasan (KTK)	6
17	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	5
18	Korban Bencana Alam	362
19	Korban Bencana Sosial	16

Sumber Data : Dinas Sosial kabupaten Pandeglang tahun 2016.

Ditinjau dari data pada tabel diatas diketahui bahwa fakir miskin/sangat miskin tidak ditemui datanya di Kabupaten Pandeglang ini dan juga secara khusus di lokasi penelitian yakni kecamatan Munjul. Tidak ada data dan informasi yang dapat dijadikan alasan kenapa fakir miskin/sangat miskin tidak ada di wilayah ini. Demikian pula informasi data tentang anak jalanan juga tidak tampak ada di kabupaten ini. Dapat dipahami bahwa lokasi penelitian ini khususnya di kecamatan Munjul memang tidak tampak adanya anak jalanan yang biasa berada di sekitar jalan dan tempat lainnya. Begitupula halnya dengan tuna susila juga tidak ada keberadaannya di wilayah kabupaten Pandeglang dan secara khusus di wilayah kecamatan Munjul. Hal ini kemungkinan besar karena pada umumnya warga masyarakat di kabupaten dan kecamatan ini masih memegang erat tradisi dan nilai kemasyarakatan di wilayah ini. Kondisi ini juga tampak pada korban trafficking yang juga tidak tampak permasalahan sosial di lokasi ini, termasuk pula didalamnya anak yang menjadi KTK/diperlakukan salah oleh para orang tua dan komunitas adat terpencil. Semua ini dimungkinkan karena lokasi kabupaten dan kecamatan merupakan wilayah pertanian

dan atau perkebunan serta kependudukan yang tertata baik, meskipun masih merupakan wilayah pedesaan.

2. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Pandeglang ini terlihat cukup variatif data nya. Dari tabel 2 dibawah diketahui bahwa pekerja sosial masyarakat sangat mendominasi jumlahnya yaitu 1.619 jiwa. Terdapat dua PSKS yang juga terlihat cukup potensial jumlahnya di wilayah kabupaten ini yaitu pendamping PKH dan operatornya berjumlah 210 jiwa dan taruna siaga bencana (Tagana) sebesar 166 jiwa. Adapun keberadaan PSKS yang lainnya jumlahnya berada dibawah 50 jiwa, seperti karang taruna ada 50 jiwa, pengurus panti sosial 38 jiwa, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) ada 35 jiwa dan lainnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Kabupaten Pandeglang tahun 2016

No. (1)	Jenis PMKS (2)	Jumlah (jiwa) (3)
1	Pekerja Sosial Masyarakat	1.619
2	Karang Taruna	50
3	Dunia Usaha Yang Melakukan UKS	3
4	WKSBM	22
5	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	35
6	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	166
7	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	1
8	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial (WPKS)	19
9	Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3)	1
10	Pendamping PKH dan Operatornya	210
11	Panti Sosial	38

Sumber Data : Dinas Sosial kabupaten Pandeglang tahun 2016.

Sumber kesejahteraan sosial (WKSBM, WPKS, LKS) dan dunia usaha yang melakukan kegiatan usaha kesejahteraan sosial merupakan pilar dalam penanganan PMKS di Kabupaten Pandeglang. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang terkait dengan permasalahan penanganan bencana adalah Tagana dan TKSK. Tagana merupakan kumpulan individu yang

sudah dilatih untuk terjun dalam penanganan bencana alam, baik korban maupun dampaknya. Anggota Tagana masuk dalam Kampung Siaga Bencana (KSB). KSB yang berada di Kecamatan Munjul beranggotakan juga Tagana. Mereka adalah para relawan yang memiliki panggilan untuk menolong sesama. Jiwa kerelawanannya tersebut menjadi suatu modal sosial untuk eksis dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial di masyarakat.

D. KESIMPULAN

Hasil pendataan lapangan yang dilakukan di Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang ini dapat memberikan data dan informasi bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lanjut usia terlantar merupakan jumlah terbesar yang ada di Kabupaten Pandeglang, dan informasi ini menggambarkan bahwa cukup besar jumlahnya warga yang berusia diatas 60 tahun dan hidup dalam kekurangan. PMKS berikutnya yang jumlahnya cukup mencolok adalah penyandang Disabilitas dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi. PMKS lainnya jumlahnya berupa ratusan jiwa, sangat jauh keberadaannya dengan PMKS yang tersebut diatas. Mengenai PSKS dapat diketahui bahwa Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) merupakan jumlah yang sangat mutlak besarnya dibandingkan dengan PSKS lainnya.

Data dan informasi yang diperoleh dari lapangan di Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, bahwa PMKS lanjut usia terlantar merupakan jumlah terbesar yang ada di lokasi penelitian ini, yaitu 6.462 jiwa. Data ini menggambarkan bahwa cukup besar jumlahnya warga yang berusia diatas 60 tahun dan hidup dalam kekurangan. PMKS berikutnya yang jumlahnya cukup mencolok adalah penyandang Disabilitas yang berjumlah 4.469 jiwa dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang berdasarkan data yang ada berjumlah 3.982 jiwa.

PMKS pemulung, pengemis dan gelandangan yang bermukim di wilayah ini, jumlahnya masing-masing sebesar 108 jiwa pemulung, 42 jiwa pengemis dan 19 jiwa gelandangan. Lokasi ini juga merupakan lokasi yang sering terjadi bencana, karena ada 362

jiwa merupakan korban bencana alam dan relatif sedikit jumlah korban bencana sosial yaitu 16 jiwa saja. Yang menarik bahwa di lokasi penelitian ini terdapat pula korban penyalahgunaan Napza yakni 45 jiwa. Artinya walaupun lokasi ini relatif jauh dengan Ibu Kota Indonesia yaitu Jakarta dan Kota provinsi yakni Banten, ternyata sudah ada korban penyalahgunaan Napza. Kiranya perlu pemikiran dan perhatian tersendiri terhadap masalah Napza ini, mengingat lokasi Kecamatan Munjul ini relatif jauh dengan daerah perkotaan dan atau daerah keramaian. Atau dimungkinkan pula mereka terkena Napza di kota, namun sakit dan telernya di kampung atau desa ini.

Selanjutnya data dan informasi tentang Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Pandeglang bahwa pekerja sosial masyarakat sangat mendominasi jumlahnya yaitu 1.619 jiwa. PSKS yang juga terlihat cukup potensial jumlahnya di wilayah kabupaten ini yaitu pendamping PKH dan operatornya berjumlah 210 jiwa dan taruna siaga bencana sebesar 166 jiwa. Adapun keberadaan PSKS yang lainnya jumlahnya berada dibawah 50 jiwa.

Selain dari pada itu PSKS yang terkait dengan permasalahan penanganan bencana adalah Tagana dan TKSK. Tagana merupakan kumpulan individu yang sudah dilatih untuk terjun dalam penanganan bencana alam, baik korban maupun dampaknya. Anggota Tagana masuk dalam Kampung Siaga Bencana (KSB). Jiwa kerelawanannya tersebut menjadi suatu modal sosial untuk eksis dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial di masyarakat.

Mengingat lokasi penelitian di Kecamatan Munjul ini sering terjadi bencana banjir apabila musim penghujan, maka sosialisasi dan pengarahan awal kepada warga masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh petugas Tagana dan TKSK yang ada di wilayah ini. Masalah Napza yang sudah ada di wilayah ini menjadi sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, agar penyandang Napza di tahun-tahun berikutnya berkurang dan bahkan kalau perlu permasalahan Napza ini menjadi hilang.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada kepala B2P3KS yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian dan menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Juga kepada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang yang membantu dalam menyukseskan penelitian ini.

Teti Ati Padi,dkk (2013). *Studi Kebijakan Penanggulangan Bencana Alam Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Kampung Siaga Bencana dalam Mengurangi Resiko Bencana Alam di Kota Padang Sumatera Barat dan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Jakarta: P3KS Press.

DAFTAR PUSTAKA

- BNBP. (2017). *Kabupaten Lebak dan Pandeglang Darurat Bencana*. www.poskotanews.com. 13 february 2017.
- Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (2001). *Petunjuk Teknis Kampung Siaga Bencana (KSB)*, Jakarta. Kementerian Sosial RI
- Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (2011). *Petunjuk Teknis Kampung Siaga Bencana (KSB)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI.
- Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial (2011). *Petunjuk Teknis Kampung Siaga Bencana*. Jakarta: Kementerian Sosial.)
- Dinas Sosial kabupaten Pandeglang (2016), *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Pandeglang*
- Dinas Sosial kabupaten Pandeglang (2016), *Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Pandeglang*
- David dan Alexander dalam Ozerdem dkk:2006, dikutip Damayanti Waryaningrum, (2016). *Modal Sosial Inklusif Dalam Jaringan Komunikasi Bencana*. Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 1, Juli 2016.
- Gunawan. (2016). *Kampung Siaga Bencana Dalam Penanggulangan Bencana*.
- Meleong, Lexi (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: remaja Rosdakarya.
- Nurjanah dkk (2014), *Managemen Bencana*, Bandung. Alfabeta.

